

UTANG LUAR NEGERI (ULN) PEMERINTAH RI: BERMANFAAT ATAU MENYENGSARAKAN?

Didiet Purnomo

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

This article tries to explain the impact of Indonesian government foreign debt on its economic condition. The debt, on one hand, especially one through the government course is badly hoped to return Indonesian economic condition to be better after crisis. On the other hand, however the government foreign debt accumulation becomes the boomerang for Indonesian government. How far is actually the permissiveness of the foreign loan can be clarified via some approaches i.e. budget principle, net transfer, and Debt Service Ratio (DSR) approaches. The visible phenomenon based on the above approaches illustrates that Indonesian government foreign debt condition is hugely accumulated, so it is regarded to exceed the repayment power.

Keywords: *Government Foreign Debt, Debt Service Ratio, Official Debt, Net Transfer.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara-negara dunia ketiga (NSB), termasuk Indonesia, akumulasi utang luar negeri (*external debt*) merupakan suatu gejala umum yang wajar. **Kenapa?** Sebab dalam tabungan dalam negeri yang rendah tidak memungkinkan dilakukannya investasi secara memadai sehingga pemerintah negara-negara berkembang harus ber-inisiatif "ngutang" atau mendatangkan pinjaman dan investasi dari luar negeri.

Konsekuensi yang harus 'diderita' akibat adanya 'impor modal' untuk menambah sumberdaya keuangan di dalam negeri yang sangat terbatas adalah terjadinya defisit neraca perdagangan dan neraca jasa pada neraca pembayaran. Realita menunjukkan bahwa sebelum awal 1970-an, total utang negara-negara berkembang masih relatif kecil. Utang tersebut merupakan utang resmi yang bersumber dari negara-negara asing dan

lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Bank-bank Pembangunan. Namun, mulai awal tahun 1980-an, bank-bank komersial internasional mendominasi dalam pinjaman internasional yaitu dengan memutar surplus dana OPEC berupa "petrodollar" serta menyalurkannya sebagai pinjaman serba guna untuk menunjang penyelesaian defisit neraca pembayaran dan pengembangan ekspor (Todaro, 1998).

Hal yang harus diketahui adalah semua pinjaman tersebut mempunyai beban biaya. Biaya terbesar atas menumpuknya utang adalah meningkatnya beban pembayaran. Bila utang-utang tersebut terus membengkak atau tingkat suku bunganya meningkat, maka dengan sendirinya pembayaran angsuran utang juga meningkat. Padahal pembayaran angsuran harus dibayar dengan devisa yang didapat dari penghasilan ekspor, pengurangan impor dan penarikan pinjaman baru dari luar negeri. **Sangat dilematis !**

Sebenarnya, terdapat berbagai motivasi atas terjadinya utang luar negeri ini, baik motivasi yang datang dari negara donor maupun motivasi dari negara penerima. Motivasi negara donor dalam menyalurkan hutang adalah pertama, untuk kepentingan politik, kedua motivasi ekonomi; sedang alasan dari negara penerima mau menerima utang LN adalah pertama, alasan yang bersifat ekonomi yaitu dengan adanya ULN tersebut diyakini akan melengkapi kelangkaan sumberdaya dalam negeri negara penerima utang (NSB), kedua, alasan politik yaitu dianggap sebagai alat yang dapat memberikan kekuatan politik yang lebih besar kepada pemimpin yang sedang berkuasa (lihat Todaro, 1998: 167-175)

REALITAS UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH RI DAN INDONESIA

Harus dicatat di sini, bahwa perlu dibedakan tentang utang luar negeri ini, yaitu utang luar negeri pemerintah, utang luar negeri BUMN dan utang luar negeri swasta (Rachbini, 2001: 27). Utang luar negeri (ULN) pemerintah RI adalah utang yang dilakukan oleh sektor pemerintah, sedangkan utang Indonesia adalah total dari utang yang dilakukan oleh pemerintah RI, BUMN dan swasta (masyarakat: perusahaan swasta). Tulisan ini sengaja hanya akan membahas utang luar negeri pemerintah, yaitu bagaimana dampak Utang Luar Negeri Pemerintah RI, apakah sebenarnya utang tersebut bermanfaat atau justru menyengsarakan.

Kondisi derita akibat adanya utang luar negeri (yang sudah terlalu besar) seperti dikemukakan oleh Sritua Arief (1993), dimana

untuk kasus Indonesia, nilai *net transfer* ke negara-negara kreditor khusus berkaitan utang jangka menengah dan jangka panjang sektor pemerintah selama 1985-1991 adalah sebesar US \$ 5,3 miliar (lihat tabel 1). Tercatat bahwa selama periode 1985-1990, *prosentase net transfer* dalam hubungannya dengan Produk Domestik Bruto telah naik sebesar empat kali lipat.

Tabel 1. Indonesia: Selisih antara Cicilan dan Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri dengan Utang Baru di Sektor Pemerintah (*Net Transfer*), 1985 - 1991, US\$

Tahun	Net Transfer ke Luar Negeri
1985	419
1986	454
1987	216
1988	525
1989	467
1990	1922
1991	1315
Jumlah	5318

Sumber: World Bank, 1992. Diambil dari Sritua Anef, 1993.

Data menyebutkan bahwa pada awal Orba, pemerintah pertama kali berhutang ke luar negeri sebesar US\$ 2, 437 miliar (1969). Lebih kurang 6 tahun kemudian (1975) kondisi ULN pemerintah RI melonjak 2 kali lipat menjadi US\$ 6,611 miliar dan pada tahun 1998 posisi ULN pemerintah RI menjadi lebih kurang 27 kali lipat dari ULN yang pertama kali (lihat tabel 2).

Tabel 2. Posisi Pinjaman Luar Negeri Indonesia Menurut Kelompok Pinjaman (US\$)

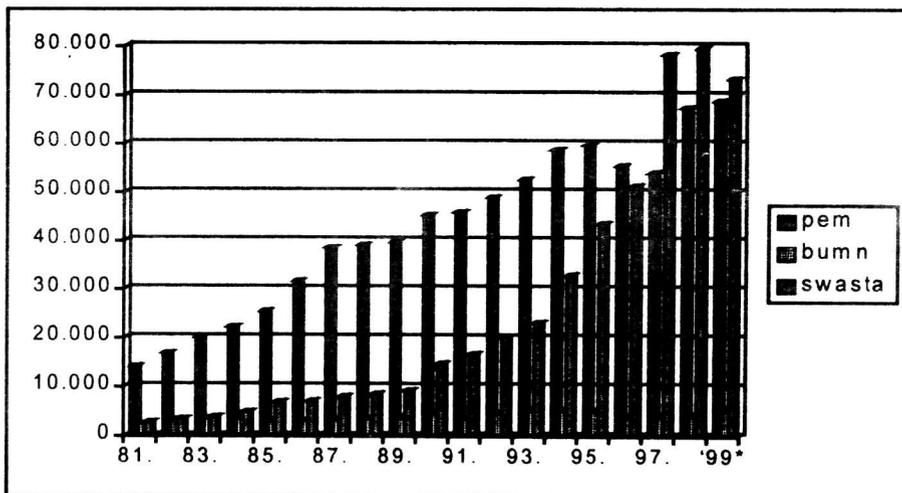
Th	Pem.	BUMN	Swasta	Jml	Th	Pem.	BUMN	Swasta	Jml
'69	2.437	n.a	n.a	2.437	85.	25.321	2.997	6.839	35.157
70.	2.778	n.a	n.a	2.778	86.	31.521	3.073	6.998	41.592
71.	3.255	n.a	n.a	3.255	87.	38.417	3.149	7.963	49.529
72.	3.617	n.a	n.a	3.617	88.	38.983	3.277	8.460	50.720
73.	4.426	n.a	n.a	4.426	89.	39.577	3.650	9.173	52.400
74.	4.851	n.a	n.a	4.851	90.	45.100	4.257	14.596	63.953
75.	6.611	1.832	n.a	8.443	91.	45.725	3.359	16.613	65.697
76.	8.295	2.009	n.a	10.304	92.	48.769	4.516	20.075	73.359
77.	9.654	1.875	n.a	11.529	93.	52.462	5.060	23.070	80.592
78.	11.330	1.708	n.a	13.038	94.	58.616	5.070	32.814	96.500
79.	11.775	1.793	n.a	13.568	95.	59.588	4.822	43.421	107.832
80.	12.994	1.876	n.a	14.870	96.	55.303	3.742	51.126	110.171
81.	13.945	2.184	2.718	18.847	97.	53.865	3.665	78.228	136.088
82.	16.767	3.270	3.401	23.438	98.	67.315	4.153	79.418	150.886
83.	19.953	3.480	3.824	27.257	'99*	68.689	5.067	73.183	146.939
84.	22.189	3.320	4.756	30.265					

* angka sementara (Mei 1999)

Sumber: Bank Indonesia, diambil dari Rachbini, 2001

Supaya lebih jelas dalam melihat perkembangan ULN tersebut, di bawah ini akan penulis tampilkan secara grafik. Namun,

data yang disajikan hanya mulai tahun 1981 mengingat data tahun 1969 sampai 1980 terdapat beberapa data yang tidak tercantum:



Gambar 1. Posisi ULN Menurut Kelompok Pinjaman (US\$)

Dapat kita lihat dengan jelas, bahwa ULN Pemerintah dan Swasta sangat 'mendominasi' total utang LN dari periode ke periode. Akan tetapi bila lebih kita cermati, mulai tahun 1997 jumlah ULN Swasta jauh melampaui jumlah ULN Pemerintah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa krisis utang LN yang kita alami dipicu karena tidak terkontrolnya ULN Swasta.

ANALISIS

Pelanjutan ULN dari periode ke periode dapat kita analisa, apakah masih dalam batas kebolehan atau sudah melampaui batas "merah" yang semestinya sudah harus di-stop. Berikut ini akan kita analisa apakah ULN yang seharusnya hanya berperan sebagai "perangsang" dan "alternatif" sumber pembiayaan pembangunan (filosofi dalam GBHN), harus tetap dipertahankan? Namun, karena keterbatasan penulis dalam pencarian data, periode tahun yang akan dianalisis hanya data tahun yang kami punya !

Pertama, berdasar salah satu prinsip dalam APBN, yaitu **Prinsip Anggaran Dinamis**. Dalam prinsip anggaran dinamis ini kita dapat melihat dua hal:

1. **Dinamis Absolut**, maksudnya terjadi peningkatan jumlah Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun → ini menunjukkan bahwa kemampuan menggali **potensi DN** terpenuhi atau tidak !

Rumus untuk menghitungnya:

$$\Delta TP = \frac{TP_x - TP_{(x-1)}}{TP_{(x-1)}} \cdot 100\%$$

dimana:

- TP_x adalah tabungan pemerintah th x
- $TP_{(x-1)}$ adalah tabungan pemerintah th sebelumnya

2. **Dinamis Relatif**, maksudnya semakin kecilnya prosentase ketergantungan pembiayaan terhadap Bantuan LN (utang luar negeri).

Rumus untuk menghitungnya:

$$Ri = \frac{BLN}{AP} \cdot 100\%$$

dimana:

- BLN adalah bantuan luar negeri
- AP adalah Anggaran Pembangunan (pengeluaran pembangunan)
- Ri adalah % ketergantungan pembiayaan

Berikut ini tabel perkembangan beberapa periode tentang Tabungan Pemerintah, Penerimaan Luar Negeri (ULN) dan Pengeluaran Pembangunan (anggaran pembangunan):

Tabel 3. Pengeluaran Pembangunan, Tabungan Pemerintah dan Penerimaan LN dari Periode 1996 – 1997 (dalam miliar Rp)

Tahun	Pengeluaran Pembangunan	Tabungan Pemerintah	Penerimaan Luar Negeri
'96/97	35.951,7	25.069,2	11.048,1
'97/98	46.938,0	23.577,6	23.817,0
'98/99	92.683,0	-21.902,6	114.585,6
'99/00*	82.448,3	5.048,3	77.400,0
'00/01	26.196,8	15.585,4	27.329,8
'01/02	33.362,0	56.141,5	35.992,7

*angka RAPBN

Sumber: Nota Keuangan berbagai terbitan. Diambil dari Tambunan, 1996.

Dari tabel di atas didapat hasil perhitungan **Dinamis Absolut dan Dinamis Relatif**, yaitu sebagai berikut:

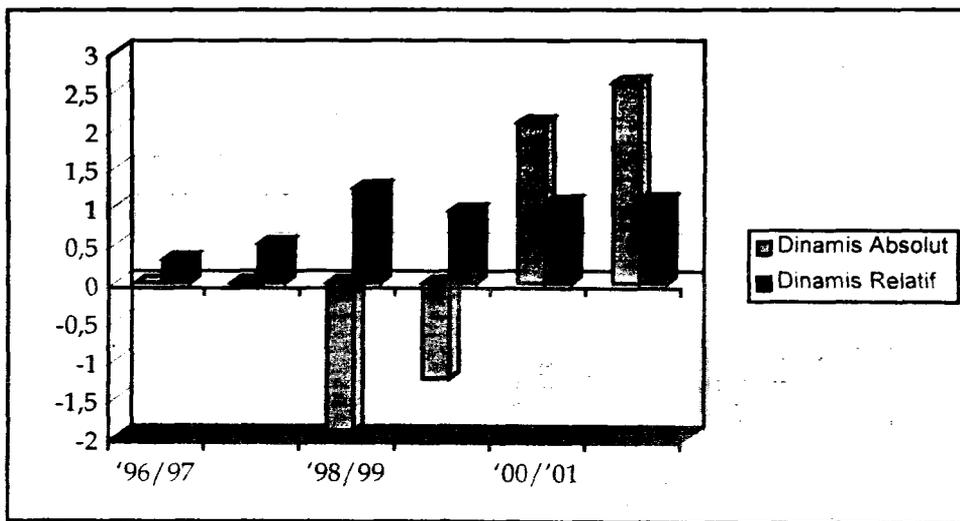
Tabel 4. Anggaran Dinamis Absolut dan Dinamis Relatif (%)

Tahun	ΔTP (angka dibulatkan)	R _i
'96/97	-	30,73 %
'97/98	- 5,95 %	50,74 %
'98/99	- 190,78 %	123,63 %
'99/00*	- 123,05 %	93,88 %
'00/01	208,73 %	104,32 %
'01/02	260,22 %	107,89 %

*dan angka RAPBN
 Sumber: hasil perhitungan penulis

Dari hasil tabel 4, dapat kita analisis bahwa perkembangan tabungan pemerintah untuk periode 1996/1997 sampai 1999/2000 adalah tidak dinamis secara absolut, karena perubahan tabungan pemerintah negatif atau nilai absolut dari tabungan pemerintah semakin turun. Sedang pada periode 2000/2001 dan 2001/2002 nilai absolut tabungan pemerintah mengalami kenaikan, artinya kemampuan menggali potensi dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan (pada periode tersebut) dapat tercapai.

Sedangkan secara relatif anggaran tahun periode yang dianalisis dapat dikatakan tidak dinamis, karena terjadi kecenderungan yang makin naik. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketergantungan terhadap ULN semakin kuat (lihat grafik 2).



Gambar 2. Hasil Dinamis Absolut dan Relatif

Kedua, berdasar pendekatan dengan Net Transfer, yaitu selisih antara penerimaan bantuan LN (ULN) dengan pembayaran bunga dan cicilan utang. Jika pembayaran kewajiban bunga dan cicilan utang lebih besar dari penerimaan bantuan LN, maka terjadi Net Distransfer. Indikator ini menunjukkan bahwa transfer dana bersih dari negara-negara donor

kepada NSB sebagai negara penerima semakin berarti atau tidak (Suseno, 1990)

Rumus yang dipakai untuk menghitung Net Transfer adalah:

$$Nt = BLN - Dt,$$

dimana:

- Nt : Net Transfer (jika angkanya minus, berarti terjadi Net Distransfer)
 BLN : Bantuan LN (ULN)
 Dt : Pembayaran bunga & cicilan utang (pemerintah)

Dari data tahun anggaran sebelum krisis, 1986/'87 – 1996/'97 diperoleh hasil seperti dalam tabel 5.

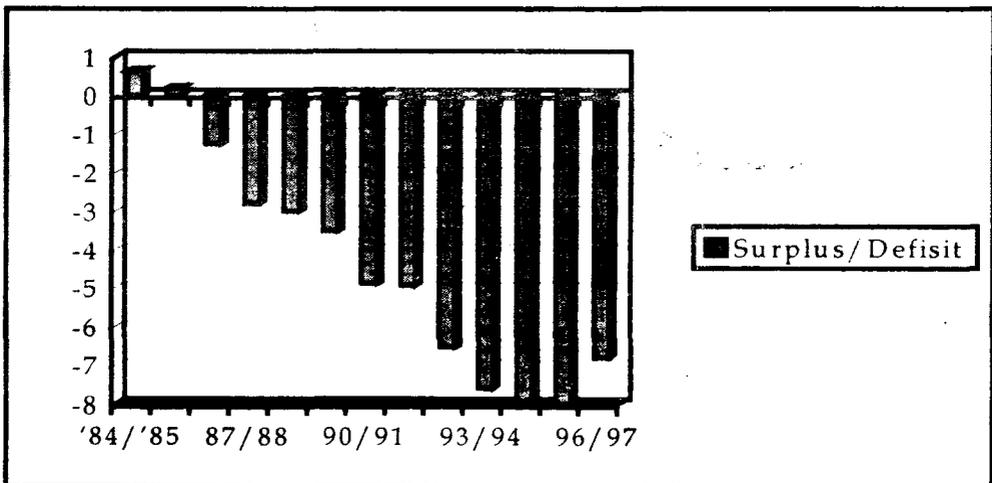
Tabel 5. Transfer Negatif ULN Pemerintah Sebelum Krisis, 1986/'87 – 1996/'97 (dalam trilyun Rp)

Tahun	Pembayaran	Utang Diterima	Surplus/Defisit
'84/'85	2,777	3,409	0,632
85/86	3,323	3,503	0,180
86/87	5,058	3,795	-1,263
87/88	8,205	5,430	-2,775
88/89	10,940	7,950	-2,990
89/90	11,939	8,422	-3,517
90/91	13,395	8,508	-4,887
91/92	13,434	8,486	-4,948
92/93	15,627	9,099	-6,528
93/94	16,712	9,126	-7,586
94/95	17,900	10,000	-7,900
95/96*	18,000	11,000	-8,000
96/97	19,939	13,152	-6,784

* angka sementara

Sumber: APBN 1984/85 – 1995/96 & Nota Keuangan. Diambil dari Rachbini, 2001

Bila dilihat dalam grafik tampak sebagai berikut:



Gambar 3. Net Transfer ULN Pemerintah RI

Dari gambar 3 tampak bahwa telah terjadi Net Distransfer selama periode analisis.

Ketiga, berdasar perhitungan DSR (*Debt Service Ratio*), dimana yang dihitung adalah membandingkan cicilan bunga dan cicilan utang terhadap ekspor bersih, yaitu ekspor dikurangi impor migas (lihat Indikator Ekonomi, Suseno, 1990). Karena keterbatasan data yang penulis peroleh, di sini hasil yang akan disajikan hanya berdasar data pembayaran bunga dan cicilan utang sektor pemerintah. Namun, sebenarnya hasil yang lebih mendekati realita apabila kita menghitung DSR nasional (Indonesia), yaitu dengan menggunakan data bunga dan cicilan utang pemerintah, BUMN dan swasta.

Rumus yang digunakan untuk menghitung DSR adalah:

$$DSR = D_t / X_{nt}$$

dimana:

- Dt · Bunga & cicilan utang
- Xnt · Ekspor bersih

Perlu diketahui di sini bahwa ambang batas yang diperbolehkan adalah bila angka DSR tidak lebih dari 20%. Bila DSR sudah diatas 20% maka dianggap tidak realistis bila tetap mempertahankan bantuan utang LN, karena jumlahnya yang sudah sangat membengkak (Indikator Ekonomi, Suseno, 1990).

Sekali lagi karena keterbatasan waktu dan data yang penulis peroleh, maka perhitungan DSR secara lengkap terpaksa tidak (belum) dapat disajikan. Namun, supaya tidak mengurangi arti pembahasan DSR ini, penulis kutipkan contoh perbandingan hasil perhitungan DSR Pemerintah RI dengan DSR Nasional (Indonesia) buku “Ekonomi Politik Utang” (Rachbini, 2001: 30) :

Tabel 6. Hasil Perhitungan *Debt Service Ratio (DSR)* Pemerintah RI & Nasional

Tahun	DSR Pemerintah	DSR Nasional
1994 /95	17,7	32,6
1995/96	16,4	32,6
1996	-	34,0
1997	-	44,8
1998	-	58,7
1999	-	51,9

Sumber: Berbagai terbitan Pemerintah. diambil dari Rachbini, 2001

Berdasar data di atas, DSR Nasional tergolong tinggi karena sudah mencapai angka lebih dari 30%, jauh melebihi batas wajar yang dapat dikendalikan (*controllable*), yaitu sekitar 20 %.

IMPLIKASI ULN DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

Implikasi dari ULN yang tercermin dalam pembayaran beban utang LN, dilihat dari sisi dalam negeri yaitu sebagai negara pengutang, sebagaimana yang dikemukakan Sritua Arief (1993): *Pertama*, pembayaran yang masif (besar-besaran) untuk cicilan utang plus bunga keluar negeri akan sangat mengurangi dana investasi untuk tujuan pembentukan modal di dalam negeri. Sekaligus kondisi ini juga tidak merangsang masuknya kembali modal yang selama ini diparkir di luar negeri. *Kedua*, ketidakanggupan atau ketidakmampuan suatu negara untuk patuh memenuhi kewajiban pembayaran cicilan utang beserta bunganya yang keseluruhan nilainya sangat memberatkan, juga akan mengurangi dana investasi untuk tujuan pembentukan modal disebabkan menurunnya arus masuk modal dari luar negeri. Hal ini terjadi sebagai akibat merosotnya keyakinan pihak luar negeri terhadap kekuatan ekonomi negara yang bersangkutan. *Ketiga*, akumulasi ULN yang

menumpuk dan kewajiban pembayaran utang plus bunga yang memberatkan, mengakibatkan terpukulnya negara yang bersangkutan secara lebih berat seandainya terjadi kegoncangan dalam keuangan dan internasional. Dan realitasnya, **kondisi-kondisi di atas telah terjadi di Indonesia !!**

Seharusnya, Indonesia harus berani meniru Meksiko, yang dalam hal ini berani mengajukan perundingan dengan pihak-pihak pemberi utang. Dari pengajuan tersebut Meksiko memperoleh hasil: (1) penghapusan utang sebesar US\$ 21 miliar, (2) pemotongan sebesar rata-rata US\$ 4,1 miliar setiap tahun kewajiban kepada bank-bank komersial internasional selama periode 1990-1994, (3) memperoleh pinjaman lunak berjangka waktu 10 dengan masa tenggang 5 tahun, (4) penundaan pembayaran kewajiban utang pokok kepada bank-bank komersial internasional sampai tahun 2019. Keberanian Meksiko tersebut didasari munculnya apa yang disebut *Brady Plan*, yaitu pemikiran baru yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang mengemukakan justifikasi ekonomis dan politis untuk memberikan keringanan beban utang kepada NSB (baca tulisan Sritua Arief tentang "Peringatan Utang: pendapat di Negara-negara Kreditor", disarikan dari: Pedro Aspe: "Three Brady Deals Described", IDS Bulletin, Vol. 21, No. 2, 1990 & Stephany Griffith: "Is The Brady Plan an Effective Approach to Debt Management?", IDS Bulletin, Vol. 21, No. 1, 1990).

Kurang lebih pada pertengahan tahun 2001, sebagian anggota DPR telah mengajukan petisi terhadap IMF yang meminta penghapusan hutang. Akan tetapi, menurut Revisond Baswir (ekonom dari UGM), bahwa petisi tersebut 'salah alamat'. Seharusnya tuntutan itu diajukan kepada negara-negara donatur, CGI atau Bank, sebab utang pemerintah Indonesia terhadap IMF 'tidak begitu besar' bila dibandingkan dengan utang terhadap para negara donatur dan Bank Dunia,

seperti tampak dalam tabel 7 (Jawa Pos, Sabtu, 7 Juli 2001).

Tabel 7. Besarnya ULN, Menurut Sumber Pinjaman

Utang Pemerintah	Besarnya utang
• Bilateral	US\$ 25,4 miliar
• Multilateral	US\$ 20,4 miliar
• Kredit Ekspor	US\$ 15,7 miliar
• IMF	US\$ 10,8 miliar
• Komersial	US\$ 1,9 miliar
• Lainnya	US\$ 1,1 miliar
Utang Swasta	US\$ 69,2 miliar
Total	US\$ 144,5 miliar

Sumber: Diolah dari data BI per September 2000 dan sumber lain.

Namun bukan berarti langkah ini salah, tetapi harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Permasalahannya adalah apakah 'pemerintah' mau menyanggupi dan menindaklanjuti langkah tersebut? (atau apakah karena memang kita akan memelihara budaya ber-utang?)

Sebenarnya, untuk penanganan kasus utang LN di Indonesia sudah ada wadah, seperti Paris Club. Di antara hasil dalam pertemuan Paris Club III, 11-12 April 2002 lalu, pemerintah mengupayakan suatu penjadwalan hutang (*resechedulling*) sebesar US\$ 5,5 miliar. Tetapi hal ini mempunyai arti pengalihan utang di masa mendatang (http://www.walhi.or.id/berita/pernyataan_sikap_koalisi_anti_utang.htm).

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, efektif (berperan)-kah 'wadah' tersebut?, mengingat Paris Club ini memang ditujukan bagi negara pengutang yang mengalami kesulitan neraca pembayaran (Mulyani, 2002). Maka sudah sepantasnya **pemerintah RI harus mengambil langkah kebijakan yang arahnya: ketegasan guna mendesak penghapusan ULN**

kepada para kreditor internasional yang telah memberikan andil atas terpuruknya ekonomi Indonesia. Pernyataan semacam ini sebenarnya telah direkomendasikan para ekonom “strukturalis”, sebagaimana Jan Tinbergen, penerima hadiah Nobel pertama bidang Ekonomi (1968) sebelum meninggal, yaitu menganjurkan penghapusan atau penyelesaian seringan mungkin utang-utang negara terbelakang (miskin). Nah, apakah kita malu dikatakan negara terbelakang (miskin)?

KESIMPULAN

ULN nampaknya masih akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi Indonesia untuk jangka waktu yang lama. Masalah-masalah yang menyebabkan ‘menggelembungnya’ ULN, seperti: besarnya utang yang telah disepakati, *current account* yang masih terus defisit, dan kebutuhan dana untuk membangun yang besar membuat ULN tidak dapat dihindari. Namun demikian, perlu adanya “optimisme” untuk mengatasi masalah ULN dan dampak negatifnya. Dalam hal ini jika memungkinkan Indonesia perlu meminta keringanan dari kreditor internasional (bahkan sangat memungkinkan: Rachbini, 2001) agar supaya tidak masuk dalam ‘lingkaran setan ULN’.

Selain itu, penting pula dikelolanya ULN dengan baik, sehingga tidak terjebak dalam ‘lingkaran setan ULN’ tersebut. Beberapa pembenahan dalam pengelolaan ULN, sebagaimana yang ‘direkomendasikan’ oleh Adingsih (September 2002) dalam makalahnya “Masalah ULN Indonesia dan Solusi Penyelesaiannya”, yaitu:

1. Perlunya pendataan ULN, dari sektor pemerintah maupun swasta dengan ‘baik’.
2. ULN sedapat mungkin hanya digunakan untuk kegiatan yang produktif sehingga dapat membiayai pengembalian dana sendiri.
3. Penggunaan dana yang berasal dari ULN tersebut harus transparan dan digunakan secara efisien.

4. Resiko ULN (seperti: resiko valas, *maturity*, likuiditas, suku bunga supaya tidak membebani ekonomi nasional pada waktu jatuh tempo).

Dengan pengelolaan utang yang baik tersebut diharapkan dapat mengurangi atau meminimalkan masalah yang dapat ditimbulkan karena adanya ULN di masa mendatang.

SUMBER BACAAN

- Arief, Sritua, 1993. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Riset Pembangunan.
- Adingsih, 2002. *Masalah Hutang Luar Negeri Indonesia dan Solusi Penyelesaiannya*, Artikel Publikasi (Cides Online), September.
- http://www.walhi.or.id/berita/pernyataan_sikap_koalisi_anti_utang.htm
- Jawa Pos, Sabtu, 7 Juli 2001.
- Mudrajad, 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, edisi pertama, Yogyakarta: UPP AMP YKPN Press.
- Mulyani, 2002. *Makna Paris Club III bagi Indonesia*, Artikel Publikasi.
- Purnomo, D., 1999. “Sumber Pembiayaan Pembangunan di Indonesia”, *Buletin Development*, diterbitkan oleh HMJ FE UMS, Vol. 1, no. 1.
- Rachbini, Didik, 2001. *Ekonomi Politik Utang: Penjelasan Teoritis-Historis atas Kebijakan Pembangunan Bertumpu pada Utang Luar Negeri*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suseno, T.W, 1990. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Todaro, M, 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, ed. 6 (terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga.